

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah sangat mengubah kehidupan kita sehari – hari. termasuk cara warga setempat memperoleh informasi dari pemerintah daerahnya. Perubahan ini juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih transparan dari sebelumnya dengan menyediakan laporan keuangan mereka di situs web mereka. Situs web ini biasa disebut dengan *e-government*. Transparansi baik keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi secara cepat, mudah, dan berbiaya rendah (Noteral., 2019)

*E-Government* adalah pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah melalui situs internet. *E-Government* yaitu penggunaan internet sebagai salah satu cara menyampaikan informasi publik oleh pemerintah. Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, tepat dan akurat menjadi suatu kebutuhan utama pada segala aspek. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi kian merambat ke berbagai sektor pula diantaranya pada sektor pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat maupun *stakeholder* lainnya diluar pemerintahan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya termasuk melakukan pelayanan, Salah satunya yaitu dalam hal penyampaian informasi publik agar menjadi lebih bersifat transparan. Setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat diakses oleh pengguna informasi diluar pemerintahan secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang ringan dan cara yang sederhana Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Wilopo., 2017)

Berbagai regulasi terkait penyampaian informasi publik atas setiap pelaksanaan pemerintahan sudah terhitung cukup lama. Dimulai dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ, 2012) Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dan mempublikasikan menu konten dalam situs web resmi pemerintah daerah ternyata belum sepenuhnya di implementasikan.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa laporan mengenai ketidaktransparansian keuangan pemerintah Indonesia yang menarik perhatian publik dan pengawas keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang dirilis pada 2021. Meski pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK mencatat

sejumlah temuan yang bisa berpotensi merugikan negara, termasuk kelemahan sistem, ketidakpatuhan, dan ketidakefisienan. Total kerugian yang diidentifikasi mencapai Rp 12,64 triliun akibat 2.026 masalah ketidakpatuhan (Kompas.com, 2021)

Pada tahun 2023, terdapat beberapa masalah terkait transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2022, BPK mengidentifikasi beberapa masalah signifikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Masalah-masalah ini tidak mempengaruhi materialitas laporan keuangan, namun tetap perlu ditangani oleh pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Pada tahun 2023, terdapat laporan terkait ketidaktransparanan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Menurut laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, telah dilakukan sosialisasi mengenai persiapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Kegiatan ini melibatkan pelaksana akuntansi dan pengurus barang di seluruh Provinsi Banten, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan. Namun, terdapat sejumlah masalah yang terungkap dalam laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan berbagai permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah, termasuk ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang menyebabkan kerugian negara. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya potensi ketidaktransparanan dan penyalahgunaan anggaran (AntaraBanten, 2023)

Berdasarkan fenomena tersebut laporan keuangan yang diungkapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diterbitkan dengan cara yang mudah diakses melalui *website* resmi pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah mengelola dana yang diterima dari pajak dan sumber-sumber lainnya, serta memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Hanya beberapa Pemerintah Daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengamati Pemerintah Daerah yang melakukan transparansi di internet serta menguji karakteristik-karakteristik tertentu yang mempengaruhinya. Alasan dari suatu Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela, berhubung internet dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan yang dapat mewujudkan transparansi Pemerintah Daerah sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang menganjurkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada prakteknya tidak semua bentuk transparansi dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. (Nurhadianto & Khamisah, 2019)

Terdapat faktor - faktor yang diduga mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan transparansi di *website* pemerintah kota/kabupaten terkait dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil akhir pemeriksaan BPK atas laporan keuangan adalah opini audit, dan opini audit tersebut diberikan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Opini audit dapat mempengaruhi transparansi laporan keuangan di situs web pemerintah daerah. Semakin banyak penyimpangan yang ditemukan oleh BPK melalui auditnya, hal itu mungkin akan berdampak pada transparansi laporan keuangan mereka. Pemerintah kota/kabupaten yang memiliki hasil audit buruk cenderung membuat laporan keuangannya tidak tersedia untuk umum. Dalam audit keuangan, auditor memberikan pendapatnya dalam bentuk laporan audit yang mencerminkan keyakinan mereka atas kewajaran penyajian laporan keuangan entitas yang diaudit. (Noretal. 2019)

Audit merupakan salah satu pilar utama dalam dunia bisnis yang berfungsi untuk memastikan keandalan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam proses audit, auditor memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit. Opini audit tersebut berfungsi sebagai indikator kualitas laporan keuangan dan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan tentang kewajaran informasi yang disajikan. Keberadaan opini audit sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, manajemen perusahaan, dan regulator. Investor dan kreditur menggunakan opini audit untuk menilai risiko investasi atau kredit yang mereka berikan. Manajemen perusahaan membutuhkan opini audit

untuk memperkuat kredibilitas laporan keuangan mereka. Sementara itu, regulator mengandalkan opini audit untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar yang berlaku (Kamal, 2021)

Transparansi laporan keuangan daerah juga bergantung kepada Ukuran Pemerintah Daerah. Ukuran pemerintah sering kali menjadi salah satu topik penting dalam studi ekonomi dan kebijakan publik. Ukuran pemerintah biasanya diukur melalui berbagai indikator, seperti jumlah pegawai negeri, belanja pemerintah sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan cakupan program-program pemerintah. Ukuran pemerintah yang besar atau kecil memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas kebijakan publik. (Wibowo, 2023)

Di satu sisi, pemerintah yang berukuran besar sering diasosiasikan dengan tingginya tingkat intervensi dalam perekonomian, yang dapat mencakup regulasi ketat, pajak yang tinggi, serta alokasi sumber daya yang signifikan untuk program sosial dan infrastruktur. Pendekatan ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi pendapatan dan penyediaan layanan publik yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ukuran pemerintah yang besar juga sering dikritik karena potensi inefisiensi, birokrasi yang berlebihan, serta beban pajak yang berat bagi sektor swasta yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah yang berukuran kecil cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih liberal dengan intervensi minimal dalam perekonomian. (Anggara, 2015)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah” (Runtu, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana aturan terkait peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah diungkapkan pada *website* resmi pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya, menguji pengaruh opini audit dan ukuran pemerintah terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah dalam melakukan transparansi informasi keuangan daerah pada *website* resmi pemerintah daerah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan daerah yang diteliti dan tahun penelitian. Penelitian tersebut mencakup seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 sedangkan penelitian ini mencakup pemerintah daerah kota/kabupaten provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2023

Hasil penelitian yang beragam itulah yang menjadi celah yang kemudian mendasari kebutuhan pengujian kembali mengenai topik serupa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud meneliti kembali tentang **"PENGARUH OPINI AUDIT DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PADA WEBSITE (Studi Kasus pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Banten) "**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Opini Audit Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Banten.
2. Bagaimana Ukuran pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Banten.
3. Bagaimana Transparansi pada *website* Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
4. Seberapa besar pengaruh Opini Audit terhadap Transparansi pada *Website* Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa barat dan Banten.
5. Seberapa besar pengaruh ukuran Pemerintahan Kota/Kabupaten terhadap Transparansi pada *website* Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Barat dan Banten.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris:

1. Untuk mengetahui bagaimana Opini Audit pada pemerintah kota/kabupaten provinsi jawa barat dan banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Pemerintah kota/kabupaten provinsi jawa barat dan banten.
3. Untuk mengetahui Transparansi di *website* Pemerintah Kota/Kabupaten di

wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Opini Audit terhadap Transparansi di *Website* Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa barat dan Banten.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran Pemerintahan Kota/Kabupaten terhadap Transparansi di *website* Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Barat dan Banten.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi *literature* yang berkaitan dengan pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, terhadap Transparansi *Website* Pemerintah kota/kabupaten Jawa Barat dan Banten. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai Opini Audit dan Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap transparansi melalui *website*.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diuraikan seperti di bawah dengan maksud untuk :

- a) Bagi Regulator sebagai bahan acuan untuk pengembangan regulasi yang lebih tegas lagi terkait pentingnya pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi nya masing masing sebagai pengimplementasian

*e-Government* serta pemanfaatan internet.

- b) Bagi Pemerintah Daerah sebagai pemahaman agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan transparan melalui *website*.

#### **1.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup 35 Pemerintah kota/kabupaten pada wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten